



**“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN MODAL DARI
BUMN KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI
PROGRAM MITRA BINAAN USAHA”
(Studi pada PT. Telekomunikasi Tbk. CD Sub Area Semarang)**

RINGKASAN TESIS

**Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh :
Fikky Harfiyandi
NIM
B4B 008 096**

**PEMBIMBING
Budiarto, SH, MS**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN MODAL DARI
BUMN KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI
PROGRAM MITRA BINAAN USAHA”
(Studi pada PT. Telekomunikasi Tbk. CD Sub Area Semarang)**

Disusun Oleh :

**Fikky Harfiyandi
B4B 008 096**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Maret 2010**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

Pembimbing,

**Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro**

**Budiarto, SH.MS.
NIP. 19560110 198203 1 002**

**H. Kashadi, SH. MH.
NIP. 19540634 198203 1 001**

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT Sang Maha Perkasa dan juru pembawa terang dari segala sumber ilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Program studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Berkat usaha dan kepasrahan kepada-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul :

“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN MODAL DARI BUMN KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI PROGRAM MITRA BINAAN USAHA (Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. CD Sub Area Semarang).”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras penulis sendiri, melainkan bantuan baik materiil maupun spirituil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sangat dalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS.Med. Sp.And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA. Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak H. Bapak H. Kashadi, S.H. M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
4. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H. M.S selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Dr. Suteki, S.H. M.Hum selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Budiarto, SH. MS Selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tesis.
7. Bapak Triyono, SH. Mkn Selaku Dosen Wali Penulis di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Tim Reviewer proposal yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis.
9. Para guru besar dan bapak, ibu dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bimbingan dan menyalurkan ilmu kepada penulis.
10. Staf Administrasi / pengajaran Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.

11. Bapak Agus Suhartanto Selaku Manager CD Area 04 Jateng dan DIY, yang telah memberikan ijin kepada penulis guna mengadakan penelitian di PT. Telekomunikasi Tbk.
12. Bapak Abi Mulantono Selaku Officer Program Kemitraan dan Bina Lingkungan CD Area Semarang yang telah banyak meluangkan waktunya untuk penulis guna memberikan petunjuk serta data-data yang penulis perlukan pada saat melakukan wawancara.
13. Orang tuaku tercinta Haifan Yahya, SE dan Armita Dewi terima kasih atas semua jasa, doa, dukungan dan semangat kepada penulis yang tidak dapat terbalas. Adikku Freddy Budiono, Kakakku Widya Veni Ani Megasari, SH dan Kakak Ipar Rahman Budaya, SE, MM terima kasih atas dukungan yang diberikan selama ini.
14. Bapak Muhammad Hafidh, SH terima kasih telah memberi kesempatan untuk belajar lebih dalam di bidang kenotariatan yang secara langsung memberikan transfer pengetahuannya ke penulis.
15. Rekan-rekan di Kantor Notaris Muhammad Hafidh, SH terima kasih telah memberi motivasi, dorongan dan saran kepada penulis.
16. Keluarga Besar Nyonya Rita Sudarwati Prananingtyas, terima kasih atas bantuan, dukungan, pengertian dan doanya sehingga tulisan ini dapat terwujud.
17. Erlina Haryati SH. MKn, terima kasih atas bantuan, dukungan, pengertian, doanya dan kasih sayang selama ini.

18. Teman-teman kos di Wonodri terima kasih atas dukungan baik disaat suka maupun duka selama ini.

19. Rekan-Rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Angkatan 2008 yang telah memberi dorongan moril serta menjadi teman diskusi dalam penulisan tesis ini.

20. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermamfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis juga mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang penulis lakukan saat ini mendapat Ridho Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, April 2010

Penulis,

(FIKKY HARFIYANDI)

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN MODAL DARI
BUMN KEPADA USAHA MIKRO KECIL MELALUI
PROGRAM MITRA BINAAN USAHA
(Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. CD Sub Area Semarang)**

ABSTRAK

Dalam meningkatkan pembangunan nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peranan penting melalui pembinaan usaha mikro dan kecil melalui Program Mitra Binaan Usaha. Program Mitra Bina Usaha merupakan program meningkatkan kemampuan usaha mikro dan kecil agar menjadi lebih berkembang dan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari sisa laba BUMN.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pemberian pinjaman bantuan modal oleh BUMN kepada usaha mikro dan kecil, Bagaimana ketentuan penyelesaian wanprestasi dalam praktek pemberian bantuan pinjaman modal oleh BUMN kepada Usaha Mikro dan Kecil.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yang menitik beratkan dengan mempelajari peraturan - peraturan yang berpedoman pada segi-segi ilmu hukum, juga mempelajari masalah - masalah hukum yang terjadi dan hidup di lapangan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program mitra binaan usaha yang dilaksanakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. CD Sub Area Semarang dengan mitra binaannya berlaku ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata yang dituangkan dalam perjanjian tertulis atau kontrak kerja sama mitra binaan usaha dan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN nomor Per-05-2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

Dalam pelaksanaan perjanjian terjadi *wanprestasi* maka cara yang ditempuh adalah dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. CD Sub Area Semarang dan dengan mitra binaannya melalui program mitra binaan usaha telah sesuai dengan tujuan program tersebut yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yaitu untuk menjadikan mitra binaan agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan bagian sisa laba BUMN.

Kata Kunci : Pinjaman Modal, BUMN dan Usaha Mikro dan Kecil

**IMPLEMENTATION OF CAPITAL LOAN ASSISTANCE GIVEN BY BUMN
TO SMALL MICRO BUSINESS THROUGH BUSINESS CONSTRUCTION
PARTNER PROGRAM
(Study at PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. CD Sub Semarang Area)**

ABSTRACT

To increasing national development, Public Company (BUMN) have important role through both micro and small business construction through Business Construction Partner Program. Business Construction Partner Program was program to increasing both micro and small business ability in order to more develop and become strong business and autonomous through fund utilization of BUMN profit remnant.

Related to that matter, therefore this research directed to studying how implementation of capital loan assistance giving by BUMN to both micro and small business, how definition of wanprestasi completion in capital loan assistance given by BUMN to both micro and small business.

Research method used in this research was analytical descriptive by juridical empirical method which focus on studying rules based on law knowledge side, also studied law's problems occurred and run in field. Based on research result could found that in implementation of business construction partner program carry out by PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, CD Sub Area Semarang with their partner construction prevailed definitions about written agreement and based on BUMN Minister Rule number Per-05/MBU/2007 about Partnership Program of Public Company with Small Business and Environment Construction Program.

Within implementation agreement occurred wanprestasi therefore the way carries out was by ignored Article 1266 and 1267 KUH Perdata.

Cooperation agreement implementation between PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. CD Sub Area Semarang and their construction partner through business construction partnership program was accordance with that program purpose which contain within BUMN Minister Rule Number Per-05/MBU/2007 about Partnership Program of Public Company and Small Business and Environment Construction Program was to create construction partner to be strong and autonomous through utilization of BUMN profit remnant part.

Keywords : Assistance Giving, BUMN, and Micro and Small Business

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan pembangunan kita tidak lain adalah guna mencapai suatu cita-cita guna terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spritual maupun materiil, yaitu sebagai suatu masyarakat yang tercipta dan diciptakan atas dasar asas-asas keseimbangan, baik secara mikro maupun makro, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan.¹

Guna mencapai dan mewujudkan cita-cita termaksud, dibutuhkan berbagai hal, baik yang berwujud dari perangkat keras maupun dari perangkat lunak. Disamping itu dibutuhkan pula berbagai kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai pendukung pembangunan itu sendiri.

Manusia yang pada hakekatnya merupakan subyek dan obyek pembangunan guna terwujudnya cita-cita masyarakat adil dan makmur tentu saja mempunyai tugas, peran dan tanggung jawab yang besar guna perwujudan cita-cita termaksud. Karena pada akhirnya manusia harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, orang lain dan akhirnya pada lingkungannya, demi kebaikan dan kepentingan bersama.

¹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 101

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai wilayah yang cukup luas, sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian dibidang agraris. Namun seiring dengan perkembangan zaman masyarakat Indonesia mulai melihat sektor usaha diluar bidang agraris. Usaha dalam bidang perekonomian mulai banyak diminati oleh masyarakat kita saat ini, oleh karena itu banyak bermunculan usaha-usaha kecil dalam berbagai bidang, yang paling umum adalah bergerak di bidang eceran dan jasa namun kegiatan usaha kecil tersebut tidak banyak yang dapat bertahan lama, banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dalam mengelola usahanya.

Usaha kecil yang merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya.²

Usaha mikro dan kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan

² Mochamad Faisal Salam, *Pemberdayaan BUMN di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2005, hal 67

ekonomi. Dalam kenyataannya kehidupan ekonomi itu sangat beragam sesuai dengan perubahan budaya dan kepentingan, dan tetap dipergunakan dalam argumentasi politik.

Sebenarnya ekonomi masih menuntut adanya hubungan dengan keadilan dan sosial, pemeliharaan lingkungan hidup, etika dan tanggung jawab sosial sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut, maka pemahaman ekonomi skala kecil dan koperasi harus terus dibina.

Negara-negara didunia dapat mempertahankan dan mengembangkan perekonomian nasionalnya dengan adanya kegiatan sektor riil. Berbagai kegiatan usaha berjalan sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing perubahan dan bisa dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu perusahaan / bisnis skala besar atau raksasa, menengah dan kecil. Pengelompokan-pengelompokan tersebut di negara yang satu berbeda dengan negara yang lain karena masing-masing negara mempunyai situasi yang berbeda. Ketiga kelompok usaha tersebut bergerak disemua bidang usaha.

Perkembangan yang ideal apabila unsur-unsur dalam kelompok-kelompok tersebut saling menghidupi dan mendorong pendapatan nasional serta terjaminnya lapangan kerja. Kenyataannya diantara kelompok-kelompok tersebut mempunyai masalah-masalah, yang paling serius adalah usaha mikro dan kecil.

Pembangunan ekonomi nasional sedang dan akan menghadapi berbagai perubahan fundamental yang berlangsung dengan cepat dan perlu kesiapan dari para pelakunya yaitu :

1. Perubahan fundamental yang pertama terjadi ditingkat internasional yaitu proses globalisasi dengan perdagangan bebas dunia sebagai salah satu motor penggerakannya;
2. Perubahan yang kedua terjadi di dalam negeri, yaitu berlangsungnya transformasi struktur perekonomian nasional dan peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti oleh perubahan pola konsumsi masyarakat.

Perubahan-perubahan ini sangat mendasar oleh karena itu menuntut perhatian semua rakyat Indonesia, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi justru menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh usaha mikro dan kecil, yang jumlahnya sangat besar dan yang menjadi sandaran hidup sebagian rakyat Indonesia, untuk tumbuh dan berkembang secara alamiah, institusional dan berkelanjutan³.

Sektor usaha mikro dan kecil telah membuktikan sebagai sektor dengan kinerja yang cukup baik. Dalam rangka proses percepatan pemulihan ekonomi, maka tidak berlebihan apabila usaha mikro dan kecil dipandang sebagai salah satu roda penggerakannya, Karena peranannya yang sangat strategis dalam struktur perekonomian nasional. Hal ini

³ Ibid, hlm.13

disebabkan, usaha kecil dan menengah mempunyai kandungan bahan baku lokal yang besar sehingga produksinya relatif tidak terganggu oleh fluktuasi harga bahan baku impor.

Usaha mikro dan kecil juga memiliki potensi pasar yang tinggi, mengingat dengan biaya produksi yang rendah harga produk yang dihasilkan pun relatif rendah, sehingga dapat terjangkau kalangan pasar di dalam negeri dan bahkan luar negeri. Selain itu, tambahannya jumlah industri koperasi dan usaha kecil cukup banyak dan terdapat di setiap sektor ekonomi. Kemudian, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja.⁴

Usaha mikro dan kecil perlu diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang, berdasarkan perkembangan tersebut, kehidupan Usaha Mikro dan Kecil perlu dilindungi dengan memberikan dasar hukum yaitu dibentuknya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kecil

Dengan adanya Undang-undang tersebut maka para pengusaha kecil dapat meningkatkan usahanya dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan iklim usaha,

⁴ Depkop, *Pemberian Modal untuk KUKM*, dikutip dari www.depkop.go.id, pada tanggal 3 Juli 2009 pukul 20.30

pembinaan dan pengembangan sehingga usaha mikro dan kecil mampu tumbuh dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, ditentukan tujuan dari pemberdayaan yaitu:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Bagi usaha mikro dan kecil yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan usahanya adalah bidang permodalan. Pengusaha kecil dan menengah masih merasa sulit untuk mendapatkan kredit dari Bank, terutama yang tidak memenuhi konsep 5 Credit, yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), dan *Condition* (situasi dan kondisi)⁵, karena pihak Bank lebih mendahulukan pemberian kredit kepada pengusaha

⁵ Drs Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 hal 394

besar, yang lebih menjanjikan keuntungan lebih besar bagi pihak Bank. Selain itu yang telah memenuhi syarat pemberian kredit kredit yaitu konsep 5 Credit dalam pengembalian pinjaman Bank mengenakan bunga yang cukup besar. Sebenarnya risiko dalam pengembalian pinjaman yang timbul dari sektor koperasi dan usaha kecil tergolong rendah dibandingkan dengan pinjaman untuk usaha skala besar dan sektor konsumsi.

Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak mampu menggunakan jasa perbankan untuk mengembangkan usahanya, sehingga bagi koperasi dan pengusaha kecil tersebut usahanya tidak dapat berkembang atau bahkan terhenti sama sekali.⁶

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan pembinaan usaha mikro dan kecil adalah dengan program mitra binaan usaha yang diberikan oleh BUMN dengan menggunakan dana dari sebagian laba yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat,

⁶ Wikipedia, *Permodalan Usaha Kecil dan Koperasi*, dikutip dari <http://www.wikipedia.org> pada tanggal 4 Juli 2009 pukul 16.00

karena itu untuk mengoptimalkan peran BUMN, pengurusan dan kepengurusannya harus dilakukan secara profesional.

Berdasarkan kenyataan tersebut pemerintah menghimbau kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan usaha mikro dan kecil, serta melaksanakan dasar program pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah (KUKM) sejalan dengan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dimana setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diwajibkan menyisihkan 1-3 % labanya setelah pajak untuk Program Mitra Binaan Usaha dan Bina Lingkungan.

Seiring dengan perkembangan perekonomian, Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 dianggap belum cukup memberikan landasan operasional bagi peningkatan pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan usaha kecil sehingga harus ditinjau kembali dan untuk menyempurnakan peraturan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Binaan Lingkungan.

Program kemitraan BUMN adalah program untuk meningkatkan program kemitraan usaha kecil agar tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Di dalam peraturan tersebut diatur mengenai program kemitraan dengan menggunakan dana laba BUMN yang bersumber dari:⁷

1. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
2. Jasa administrasi pinjaman / margin / bagi hasil, bunga deposito dan / atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
3. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Sebagai salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi berkewajiban membantu meningkatkan perekonomian Negara dan meningkatkan jalinan kemitraan yang saling menguntungkan dan mendukung secara sinergis antara PT. Telkom, Tbk dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya melalui Direksi Telkom, PT Telkom, Tbk mengeluarkan Keputusan Direksi pada tanggal 6 Juni 2007 Nomor : KD 30/ PR. 000/COP-B0030000/2007 tentang Pengelolaan program Kemitraan dan program Bina Lingkungan dan KD 12/ PS150/COP-B0030000/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2008 tentang Organisasi Pusat pengelolaan. Organisasi ini diberi nama *Telkom Community Development Center (TCDC)*.

Perjanjian kerja sama antara PT. Telkom Tbk, CD Sub Area Semarang kepada mitra binaanya, dalam hal pemberian pinjaman modal tersebut mengacu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak tersebut merupakan dasar hukum lahirnya atau pembuatan perjanjian dalam praktik, termasuk perjanjian kerja sama dalam hal pemberian bantuan modal dari PT. Telkom, Tbk CD Sub Area Semarang kepada Usaha mikro dan Kecil. Asas kebebasan berkontrak tersebut tercermin dalam Pasal 8 ayat (1) akta perjanjian kerjasama ini:

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis memberikan judul penelitian tesis ini dengan judul :

⁷ Pasal 9 PERMENEG BUMN PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN MODAL DARI
BUMN KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI PROGRAM
MITRA BINAAN USAHA (Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia
Tbk. CD Sub Area Semarang)**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian pinjaman bantuan modal oleh BUMN kepada Usaha Mikro dan Kecil melalui program Mitra Binaan Usaha ?
2. Bagaimana ketentuan penyelesaian wanprestasi dalam praktek pemberian bantuan pinjaman modal oleh BUMN kepada Usaha Mikro dan Kecil ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian mengenai pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman modal oleh BUMN.
2. Untuk mengetahui mengenai ketentuan penyelesaian *wanprestasi* dalam praktik pemberian bantuan pinjaman modal oleh BUMN kepada usaha mikro dan kecil.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya .

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan sebagai berikut :

- a. Dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak dalam pembinaan usaha mikro dan kecil oleh BUMN melalui program mitra binaan usaha.
- b. Dapat memberikan bahan masukan kepada BUMN dalam melaksanakan pemberian pinjaman modal kepada usaha mikro dan kecil.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia memiliki tujuan dari Pembangunan Nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan rakyat yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Dengan terwujudnya keterbukaan perekonomian dunia dalam era perdagangan bebas baik pada tingkat regional maupun tingkat internasional, menuntut keberadaan sejumlah besar Usaha Kecil dan menengah yang tangguh dan mandiri dalam struktur perekonomian

nasional. Sehubungan dengan itu maka usaha mikro dan kecil harus memberdayakan dirinya atau dibuat berdaya oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan dapat dilaksanakannya demokrasi ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 merupakan prinsip demokrasi ekonomi, dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ”dimana” cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 merupakan sumber keberadaan Badan Usaha Milik Negara. (BUMN). Berdasarkan Pasal 1 (b) PERMENEG BUMN/ PER-05/MBU/2007 BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Perkataan Badan Usaha Milik Negara sudah menunjukan suatu badan usaha yaitu suatu badan yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan usaha diartikan sebagai kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan atau maksud.

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 mempunyai 2 bentuk usaha yaitu PERUM dan PERSERO yang pada dasarnya adalah milik negara, karena modal yang ditanam adalah kepunyaan negara. Namun dalam Persero tidak menutup kemungkinan sahamnya dimiliki oleh umum, hanya saja tidak bisa semua sahamnya dimiliki oleh umum. Pemerintah harus mempunyai sedikitnya 50% (persen) dari total keseluruhan saham sebuah Persero.

Berbeda halnya dengan Perum, Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya merupakan milik negara dan tidak terbagi atas saham. yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Menurut A. Ridwan Halim, pengertian badan usaha mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :⁸

1. Perwujudan organisasi perusahaan yang memberi bentuk, cara kerja, wadah kerja dan bentuk/besar kecilnya tanggung jawab pengurus/para anggotanya;
2. Menghasilkan laba yang didapat dari hasil pemasaran barang-barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaannya;
3. Merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang terorganisir.

⁸ Cidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hal 107-108.

Dari unsur-unsur diatas, pengertian badan usaha tidak dapat dilepaskan keberadaannya sebagai perusahaan, akan tetapi dapat dibedakan. Perbedaan antara badan usaha dan perusahaan secara prinsipil tidak ada.⁹

Menurut Polak, suatu perusahaan dianggap ada apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta dalam kedudukan tertentu untuk mendapatkan laba bagi dirinya. Pandangan ini tidak jauh seperti yang diungkapkan Algra yang menentukan unsur-unsur perusahaan sebagai berikut :¹⁰

1. Teratur (*regelmatig*);
2. Keterbukaan (*openlijk*);
3. Kualitas tertentu (*in zekere kwaliteit*);
4. Bertujuan mencari laba (*winstoogmerk*).

Sudah menjadi gejala umum didunia, negara-negara dengan sengaja ikut serta dalam usaha perdagangan dengan membentuk perusahaan-perusahaan. Maksud keikutsertaan itu tidak lain adalah agar laba atau keuntungan yang diperolehnya akan digunakan untuk jalannya pemerintahan negara dalam rangka menjalankan tugas publiknya. Kecenderungan demikian tidak hanya kita temukan dinegara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara yang dikategorikan sebagai negara maju.

⁹ Ahmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan pertama, 1986, hal 79.

¹⁰ Mochamad Faisal Salam, op.cit., hal 24

Perusahaan-perusahaan negara di Indonesia, yang berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 1960 jo Undang-undang 9 Tahun 1969 diberi bentuk PERJAN, PERUM dan PERSERO pada dasarnya adalah milik negara, karena modal yang ditanam adalah kepunyaan negara (Pasal 1 UU No.19 Tahun 1960). Sedangkan didalam UU No.9 Tahun 1969 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dimungkinkan saham-saham BUMN dimiliki oleh swasta¹¹.

Keberadaan hak milik negara dalam teori menimbulkan pandangan yang berbeda-beda, di satu pihak pandangan yang tidak mengakui hak milik pada negara dan di pihak lain negara dapat mempunyai hak milik seperti halnya individu-individu manusia.¹² Teori ini diikuti oleh pakar hukum di Indonesia, hal ini dapat dilihat pada pembentukan Undang-undang Dasar 1945 dimana didalam Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi:

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Jadi meskipun negara melalui *perusahaan* negaranya bertindak dilapangan hukum perdata, namun perusahaan diadakan dalam rangka melayani kepentingan umum. Walaupun perusahaan negara tersebut dimaksudkan juga untuk mencari keuntungan, maka laba yang diperolehnya merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas

¹¹ Mochamad Faisal Salam, op.cit, hal 11.

¹² Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, terjemahan Mohamad Rajab Bhadrata, Jakarta, 1977, hal 134.

negara, selain itu juga laba dari perusahaan negara tersebut dapat digunakan sebagai alat peningkatan ekonomi nasional, yang salah satu alatnya adalah usaha mikro dan kecil.

Menyadari kedudukan usaha kecil dan menengah dalam mendukung pertumbuhan ekonomian nasional, maka pemerintah jauh-jauh hari sudah berusaha menaruh perhatian kepada pengusaha kecil. Perhatian kepada usaha kecil dan dari segi keuangan atau permodalan yaitu dengan mengalokasikan maksimal 2% dari laba BUMN setelah pajak untuk koperasi dan usaha kecil. Dari semua aspek yang dukungan keberhasilan satu usaha, ternyata terdapat beberapa masalah yang salah satunya adalah masalah permodalan. Masalah permodalan menjadi salah satu masalah yang sulit dipecahkan oleh para pengusaha kecil. Oleh karena itu pemerintah berusaha menutup kebutuhan modal para koperasi dan pengusaha kecil sebaik-baiknya.¹³

Perhatian pemerintah sudah dimulai sejak adanya program Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Permanen (KMKP), Kredit BIMAS, Kredit Canda Kulak dan Kredit Usaha Kecil (KUK) yang berusaha memberikan bantuan permodalan dari bank-bank pemerintah. Disamping itu beberapa Departemen teknis masing-masing seperti Departemen Perindustrian (program Pelatihan Kewirausahaan), Departemen Pertanian (program P4WK), Departemen sosial, BKKBN (program Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) sudah lama memiliki program pembinaan terhadap pengusaha kecil yang terkait dengan

¹³ Hiro Tugiman, *Peranan Usaha Kecil dan Koperasi dalam Memanfaatkan Sisa Laba BUMN*, Eresco, Bandung, 1995, hal 16

fungsinya. Namun pelaksanaan penyaluran kredit diatas ternyata tidak semulus seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi antara lain kurangnya kemampuan jangkauan perbankan dan tidak dapat dipungkiri bahwa dari segi kemudahan pengelolaan dan keuntungan pemberian kredit kepada usaha menengah dan besar lebih aman, hal ini antara lain karena jaminan yang cukup.

Seiring dengan berkembangnya peraturan yang mengatur mengenai pengembangan usaha kecil, maka PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk CD Sub Area Semarang turut serta untuk melaksanakan pembinaan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil dengan Program Mitra Binaan Usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dengan nama program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi), Telkom ikut memberi pelumas agar roda ekonomi lebih lancar berputarnya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, membawa paradigma perubahan pengelolaan perusahaan. Salah satunya, di Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT 2007) terdapat kewajiban bagi PT yang mengelola sumber daya alam maka diwajibkan melakukan program model tanggung jawab sosial dan lingkungan atau disebut juga *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pembinaan sendiri mempunyai pengertian suatu upaya pemberdayaan dalam mengembangkan dan meningkatkan kegiatan koperasi dan usaha kecil menjadi kuat dan mandiri, yang mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peningkatan kemampuan usaha mikro dan kecil.

Pengertian usaha kecil menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.

Usaha Kecil menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Program pembinaan melalui BUMN dimulai dengan permintaan Presiden mengenai “Bapak Angkat” maka dimulailah pembinaan koperasi dan usaha kecil melalui pemanfaatan sisa laba Badan Usaha Milik Negara. Himbauan ini dikukuhkan dengan keluarnya berbagai keputusan peraturan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi;
2. Keputusan Menteri Keuangan No.316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari bagian Laba BUMN;
3. Surat DIRJEN Pembinaan BUMN No. S 148/MK.16/1995 tanggal 19 April 1995 tentang Alokasi dana Pembinaan, BUMN Koordinator dan BUMN pembina disetiap Provinsi;
4. Keputusan bersama antara DIRJEN Pembinaan BUMN dengan DIRJEN Pembinaan Pengusaha Kecil No. KEP 1515/BU/1994 dan 02/SKB/PPK/X/1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN;
5. Inpres No.4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan (GNMMK);
6. Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
7. PERMENEG BUMN PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
8. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam hal ini, PT Telkom, Tbk mengeluarkan Keputusan Direksi pada tanggal 6 Juni 2007 Nomor : KD 30/ PR. 000/COP-B0030000/2007 tentang Pengelolaan program Kemitraan dan program Bina Lingkungan dan KD 12/ PS150/COP-B0030000/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2008

tentang Organisasi Pusat Pengelolaan.

Sebagai perwujudan dari PERMENEG BUMN PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Perjanjian pinjam meminjam menurut Bab XIII Buku III KUH Perdata mempunyai sifat riil, hal ini disimpulkan dari kata-kata Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi¹⁴:

"Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula"

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh BUMN untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi salah satunya dengan cara pembuatan perjanjian peminjaman modal yang lebih mengikat kedua belah pihak, dimana klausul-klausul yang ada didalam perjanjian itu harus memberikan efek jera kepada pihak yang melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian itu.

Berbicara mengenai pinjam meminjam, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pengertian tersebut sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan "perbuatan" tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan

¹⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hal 125

melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:¹⁵

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUH Perdata.

Sehingga perumusannya menjadi, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum. Sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian (*consensus*);
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian (*capacity*);
3. Suatu hal tertentu (*object*);
4. Suatu sebab yang halal (*causa*).

¹⁵ R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999, hal 49

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.228

Dalam perjanjian peminjaman sekurangnya ada dua pihak yang saling berkepentingan, dimana pihak yang meminjamkan uang (kreditur) dan pihak peminjam uang (debitur) harus melakukan kewajibannya masing-masing sesuai apa yang telah diperjanjikan sebelumnya (prestasi).

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian, dalam Pasal 1234 KUH Perdata ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Sedangkan lawan dari prestasi adalah *wanprestasi*, adapun pengertian *wanprestasi* adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan didalam perjanjian.¹⁷

Jika didalam perjanjian peminjaman modal dari PT. Telkom, Tbk kepada usaha mikro dan kecil terjadi *wanprestasi* maka salah satu upaya penyelesaiannya adalah ganti rugi. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, yang dimaksud dengan kerugian dalam Pasal ini adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan *wanprestasi*.¹⁸

¹⁷ Ibid, hal.202

¹⁸ Ibid, hal.207

Wanprestasi (Kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam¹⁹ :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika *wanprestasi* itu benar-benar menimbulkan kerugian kepada kreditur, maka debitur wajib mengganti kerugian yang timbul. Akan tetapi untuk itu harus ada hubungan sebab akibat atau *causal verband* antara *wanprestasi* dengan kerugian.

Mungkin dengan adanya perjanjian yang dijalankan sesuai dengan kaidah dan aturan yang ada, dapat meningkatkan kinerja dari usaha mikro dan kecil dalam sektor ekonomi riil dan mengurangi penyimpangan terhadap perjanjian dalam peminjaman modal dari BUMN, maka perekonomian Indonesia dapat lebih berkembang ke arah yang lebih baik, karena usaha mikro dan kecil merupakan tulang punggung serta salah satu struktur dalam perekonomian nasional.

F. Metode Penelitian

“Metodologi” berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “logos” yang artinya ilmu atau

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 45

pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis samapai menyusun laporannya.²⁰

Berdasarkan permasalahan yang menjadi tujuan dari penelitian ini, maka agar penelitian ini memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan suatu metode yang tepat sebagai pedoman dan arah dalam mempelajari obyek yang diteliti. Dengan demikian penelitian akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga dengan menggunakan metode yang tepat diharapkan seseorang mampu menemukan, menentukan, menganalisis suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode mampu memberikan pedoman dan arah tentang bagaimana orang mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang akan dihadapi.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan

²⁰ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal 1

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²¹

Ronny Hanitijo Soemitro, SH menyebutkan bahwa penelitian pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.²² Menemukan bahwa sesuatu itu belum ada dan berusaha memperoleh sesuatu tersebut untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam dari sesuatu yang telah ada, menguji kebenaran apabila masih diragukan kebenarannya.²³

Metode penelitian ini antara lain :

1. Pendekatan Masalah

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian di lapangan) dan data sekunder.

Pendekatan yuridis yaitu meliputi hukum hanya sebagai hukum in book, yakni dalam mengadakan pendekatan, prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang masih berlaku dipergunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 43

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Gahalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 15.

²³ Ibid. Hal. 19.

Pendekatan secara empiris yaitu suatu pendekatan yang timbul dari pola berpikir dalam masyarakat dan kemudian diperoleh suatu kebenaran yang harus dibuktikan melalui pengalaman secara nyata di dalam masyarakat.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris maksudnya yaitu disamping mempelajari peraturan-peraturan yang berpedoman pada segi-segi ilmu hukum, juga mempelajari masalah-masalah hukum yang terjadi dan hidup di lapangan. Hal ini sesuai dengan disiplin ilmu dalam penelitian ini, dimana menyangkut berlakunya hukum.²⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan mengenai pembinaan koperasi dan usaha kecil oleh BUMN (PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. CD Sub Area Semarang) sebagai upaya dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional. Selanjutnya menganalisis mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan pembinaan koperasi dan usaha kecil oleh BUMN (PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. CD Sub Area Semarang)

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pemecahan masalah yang akan diteliti, oleh karena subyek penelitian tidak bisa berdiri sendiri sehingga akan bergantung dengan obyek penelitian.

²⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal 91

Sehingga keduanya akan menimbulkan hubungan, hubungan mana merupakan suatu hubungan hukum jadi bukan hubungan social semata.

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah :

- a. Manager CD Area 04 Jateng dan DIY, yaitu Bapak Agus Suhartanto;
- b. Officer Program Kemitraan dan Bina Lingkungan CDS Area Semarang, yaitu Bapak Abi Mulantono

Obyek penelitian yakni Surat Perjanjian Tentang Pinjaman Program Kemitraan dan tempat penelitian di Kantor CDC Area Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian ilmiah memerlukan data dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data yang tepat, karena sumber data yang tidak tepat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diselidiki sehingga dapat menimbulkan kekeliruan, dalam menyusun interprestasi data dan kesimpulan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yaitu :

a. Data Primer

Data Primer yang diperoleh adalah dengan melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan mempergunakan teknik pengumpulan

data wawancara. Wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan²⁵.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai langkah awal untuk memperoleh :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu beberapa peraturan perundang undangan antara lain :
 - a) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - b) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan;
 - c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan;
 - f) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-236/MBU/2003 Tanggal 17 Juni 2003 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
 - g) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 Tentang Program

²⁵ Ibid. Hal. 57.

Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

h) Dokumen Perjanjian Pembiayaan;

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yaitu Hasil-hasil Penelitian;
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain berupa data-data di internet, artikel di Koran dan majalah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif, yaitu penggambaran mengenai keadaan obyek penulisan secara utuh sehingga penulis dapat memahami, mengerti dan pada akhirnya menjelaskan setiap gejala yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang PT

1. PT Sebagai Badan Hukum

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) menurut Pasal 1 angka 1

Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan bahwa :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Menurut definisi tersebut diatas maka unsur - unsur Perseroan

Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah :²⁶

- a. Suatu badan hukum;
- b. Persekutuan Modal;
- c. Dasar pendirian perseroan adalah perjanjian;
- d. Modal dasar terbagi dalam saham;
- e. Memenuhi ketentuan peraturan.

Perseroan Terbatas untuk dapat disebut sebagai suatu badan usaha harus mempunyai ciri-ciri antara lain harus mempunyai kekayaan sendiri, ada pemegang saham sebagai pemasok modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi dari nilai saham yang

²⁶ Hardja Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal 17

diambilnya (modal yang disetor) dan harus ada pengurus yang teroganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum diluar maupun di dalam pengadilan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan-perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas. Ini berarti bahwa badan usaha disebut perseroan harus menjadi dirinya sebagai badan hukum, sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham, dan para pengurusnya.

Menurut Sumarti²⁷, walaupun dalam peraturan lama tidak secara menyatakan perseroan terbatas adalah badan hukum, namun dari pasal 40 (2) KUHD yang menyatakan bahwa : *"Persero-persero atau pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih dari pada jumlah penuh saham-saham itu"*., dan dari bunyi Pasal 45 ayat 1 KUHD yang menyatakan : *"Pengurus tidak bertanggung jawab lebih dari pelaksanaan yang pantas dari beban yang diperintahkan kepadanya; mereka tidak terikat secara pribadi kepada pihak ketiga berdasarkan perikatan-perikatan yang dilakukan oleh perseroan"*. Dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum.

²⁷ Siti Sumarti Hartono, *Perseroan Terbatas Dalam Pendirian, Kertas Kerja Dalam Seminar Sehari Hukum Perseroan dan Hukum Pertanggungan (Asuransi) Dalam Kenyataan dan Harapan*. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1988, hal 6

Baik dalam UU Nomor 40 tahun 2007 dan UU Nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas dinyatakan dengan tegas didalam pasal 1 ayat (1) seperti diatas bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum. Dengan demikian, kedudukan perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum tidak perlu lagi disimpulkan sebagaimana halnya dalam KUHD sebab telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum.²⁸

2. Jenis - Jenis PT

Ditinjau dari cara menghimpun modal perseroan, maka perseroan terbatas (PT) dapat dibedakan menjadi :

a. PT Terbuka

PT Terbuka adalah suatu PT dimana masyarakat luas dapat ikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT Terbuka melalui bursa dalam rangka memupuk modal untuk investasi PT, atau dewasa ini biasa disebut "PT yang go-public".

Dalam UUPT pengertian Perseroan Terbuka tercantum pada pasal 1 ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut : Perseroan terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan

²⁸ Agus Budiharto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Tahun 2002, hal 26 -27.

penawaran saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang pasar modal

Dari pengertian diatas maka PT Terbuka dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. PT yang go publik, yang melakukan penawaran umum sesuai butir 2;
2. Perseroan publik. Adapun yang dimaksud perseroan publik ini adalah PT yang tidak melakukan penawaran umum dalam arti tidak menjual sahamnya melalui bursa, namun modalnya sangat besar dan terbagi atas sejumlah pemegang saham yang banyak sekali.

Selain itu terhadap PT Terbuka dalam pasal 16 ayat (2-3) UUPT mengharuskan dengan singkatan “Tbk” dan juga harus didahului dengan perkataan “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.

b. PT Tertutup

PT Tertutup adalah PT yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, yang berarti tidak setiap orang dapat ikut menanamkan modalnya.

Pengertian mengenai PT Tertutup dalam UUPT tidak ditemui, namun demikian dapat ditafsirkan bahwa “PT Tertutup

adalah bukan PT Terbuka". Ini berarti PT Tertutup adalah tidak termasuk pada kriteria yang termuat dalam pasal 1 ayat (7) UUPT.

c. PT Perorangan

PT Perseorangan berarti bahwa saham-saham dalam PT tersebut dikuasai oleh seorang pemegang saham. Hal ini dapat terjadi setelah melalui proses pendirian itu sendiri. Pada waktu pendirian PT, terdapat lebih dari seorang pemegang saham, yang kemudian beralih menjadi berada pada seorang pemegang saham.

3. Dasar Hukum Pembentukan PT

Tiap-tiap PT mempunyai undang-undang yang dijadikan acuan atau sebagai dasar pengaturan²⁹, sebagai berikut :

1. PT Tertutup berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 serta peraturan pelaksanaanya;
2. PT Terbuka berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. PT PERSERO berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1998 tentang perusahaan persero atau PT. PERSERO

²⁹ I.G. Ray Widjaya, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha, Hukum Perusahaan*, Megapoin 2006, hal141

Selanjutnya PT PERSERO adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Adapun definisi dari Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 adalah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena itu untuk mengoptimalkan peran BUMN, pengurusan dan kepengurusannya harus dilakukan secara profesional

4. Organ Perseroan

a. RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diatur dalam Bab V pasal 63-78 UUPT. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang, yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam perseroan terbatas, yang merupakan suatu wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan operasional dari perseroan terbatas. Disini yang harus menjadi perhatian adalah bahwa para pemegang saham sebagai perseorangan bukanlah merupakan alat atau organ dari perseroan, melainkan yang menjadi alat/organ adalah RUPS.³⁰

RUPS terdiri dari RUPS tahunan yang diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku ditutup dan juga dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, biasa disebut dengan Rapat Umum Luar biasa Pemegang Saham.

Yang berhak memanggil para pemegang saham untuk menghadiri RUPS itu biasanya/umumnya dilakukan oleh Direksi ataupun oleh Dewan Komisaris. Hal ini biasanya dinyatakan dengan tegas dalam Anggaran Dasar suatu perseroan kecuali

³⁰ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1976, hal 96.

RUPS tersebut dilakukan dengan campur tangan hakim, maka hakim dapat menentukan cara pemanggilan.³¹

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut hukum dianggap mewakili atau mencetuskan kehendak dari perseroan sehingga keputusan yang diambil dalam rapat umum ini dianggap sebagai keputusan-keputusan itu tersendiri. Keputusan ini tidak dapat ditentang oleh siapapun dalam perseroan, kecuali jika keputusan tersebut bertentangan dengan Undang - Undang, atau maksud dan tujuan perseroan yang dimuat dalam Anggaran Dasar.³²

b. Direksi Perseroan

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, demikian bunyi pasal 1 ayat (4). Kemudian dipertegas oleh pasal 79 ayat (1) jo pasal 82 yaitu pengelolaan perseroan dilakukan oleh Direksi dan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan

³¹ Rahmat Soemitro, *Penuntun Perseroan Terbatas dan Undang - Undang Pajak Perseroan*, PT. Erosco, Bandung, 1982, hal 65.

³² Parasian Simanjuntak, *RUPS, Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, 2006, hal 35.

(bukan kepada perseroan pemegang saham) untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan.

Tanggung jawab Direksi dilandasi prinsip *fiduciary duty* yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan dipercayakan kepadanya oleh perseroan dan Prinsip *duty of skill and care* yaitu prinsip yang mengacu pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi.

Dengan adanya prinsip ini maka Direksi dituntut untuk bertindak secara hati-hati akan pailitan disertai itikad baik juga penuh tanggung jawab bagi kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap hal tersebut, membawa konsekuensi yang berat bagi Direksi, karena ia dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya

1) Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Direksi

Melihat tanggung jawab Direksi yang demikian itu maka untuk menjadi anggota Direksi pasal 79 ayat (3) UUPT menentukan syarat-syarat yaitu³³ :

³³ C.S.T. Kansil dan Christie S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007*, Jakarta, 2009, hal 13.

- a) Orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- c) Atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan penghasilanya ditentukan RUPS. Kewenangan RUPS ini dapat dilakukan Komisaris jika ditetapkan dalam Anggaran Dasar (pasal 81 ayat (2)).

2) Tugas-tugas Direksi

Tugas atau Kewajiban Direksi/Anggota Direksi itu adalah sebagai berikut :³⁴

- a) Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
- b) Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang, seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan;

³⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal 88.

- c) Melakukan pendaftaran dan pengumuman setelah akta pendirian mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman;
- d) Melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan;
- e) Mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan;
- f) Menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.
- g) Memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan Daftar Pemegang Saham, risalah dan pembukuan dengan permohonan tertulis pemegang saham;
- h) Melaporkan kepada perseroan tentang kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

c. Komisaris Perseroan

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan (pasal 1 ayat (5)). Perkataan Komisaris mengandung pengertian baik sebagai "organ" maupun sebagai "orang perorangan". Sebagai organ komisaris lazim juga disebut "Dewan Komisaris", sedangkan sebagai orang perseorangan disebut "anggota

komisaris". Sebagai organ, dalam UUPT ini pengertian "Komisaris" termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus dibidang tertentu.

Tugas Komisaris, seperti di tegaskan dalam pasal 97 adalah mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Komisaris dapat melaksanakan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Anggaran Dasar atau Keputusan RUPS (pasal 100 ayat (2). Wewenang kepada Komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan yang sebenarnya hanya dapat dilakukan dalam hal Direksi tidak ada. Apabila Direksi ada, Komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang secara tegas ditentukan dalam UUPT.

Tanggung jawab Komisaris dalam hal terjadi kesalahan atau lalai dalam melakukan tindakan pengurusan mak berlaku pula tanggung jawab Direksi untuknya, yaitu dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya.

Selain itu Komisaris wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan terbatas tersebut dan perseroan lain.

B. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Pasal 1233

KUHPerdata menyatakan:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang”

Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.³⁵

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *Overeenkomst*. Achmad Ichsan menerjemahkan *Verbinten* dengan perjanjian dan *Overeenkomst* dengan persetujuan. Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia memakai istilah *Verbinen* dengan perutusan dan *Overeenkomst* dengan perjanjian. Menurut buku III KUHPerdata mengatur mengenai *Overeenkomst* yang dikenal dua istilah terjemahannya, yaitu.³⁶

³⁵ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

³⁶ R. Setiawan, op.cit, hlm ix

- a. perjanjian
- b. persetujuan

Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan lahir baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang. Melalui apa yang disebutkan dalam pasal ini maka perjanjian itu merupakan salah satu sumber perikatan.

Perikatan yang lahir dari perjanjian dikehendaki melalui kesepakatan oleh para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang tidak disepakati oleh pihak-pihak namun karena kekuasaan peraturan perundang-undangan yang dipaksakan kepada orang atau badan hukum.

Undang-undang memberikan definisi dari perjanjian yaitu pada Pasal 1313 KUHPerdata yang bunyinya:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

R. Setiawan memakai istilah persetujuan untuk menyebutkan perjanjian yang pengertiannya kurang lebih sama. Menurut beliau rumusan perjanjian yang diatur pada Pasal 1313 KUHPerdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Ketidaklengkapan ini dikarenakan hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja. Sedangkan disebut

sangat luas karena dengan dipergunakannya kata “perbuatan” juga melingkupi perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:

- a. perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. menambahkan “atau saling mengikatkan dirinya” pada Pasal 1313 KUHPerdata.

sehingga perumusannya menjadi, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁷

Maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian merupakan tindakan dari satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih, sehingga dengan terikatnya para pihak maka timbul kewajiban dari masing-masing pihak untuk saling memenuhi prestasi.³⁸

Sehubungan dengan adanya perjanjian, maka konsekuensi logis yang timbul adalah adanya ikatan-ikatan antara pihak yang mengadakan perjanjian, atau umumnya disebut perikatan. Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang

³⁷ Ibid, hlm 49

³⁸ Ibid

terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Akibat hukum dari adanya perikatan adalah hukum meletakkan hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya, sehingga hukum akan memaksakan hubungan/ perikatan itu dapat dipenuhi atau dipulihkan apabila ada satu pihak yang tidak mengindahkan/ melanggar perikatan yang telah disepakati bersama. Hal ini diperkuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa suatu perjanjian berlaku pula sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

Peristiwa yang terjadi di mana seseorang saling berjanji kepada orang lain menimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya perikatan merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji dan kesanggupan yang diucapkan ataupun ditulis. Perikatan adalah suatu perbuatan hukum yang artinya adalah bahwa hubungan itu diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum perlu dibedakan dengan hubungan yang lain misalnya dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan dan kepatutan. Pada awalnya para ahli hukum menggunakan ukuran dapat dinilai dengan uang, akan tetapi ukuran ini tidak dapat memberikan pembatasan, karena sering terjadi hubungan hukum di masyarakat yang sulit diukur dengan uang.

Namun walaupun ukuran tersebut sudah ditinggalkan tidak berarti suatu ukuran dapat dinilai dengan uang tidak kontekstual lagi dengan keadaan saat ini, karena tiap perbuatan hukum yang dapat diukur dengan uang selalu merupakan perikatan.

Dalam perikatan terdapat 2 (dua) macam pihak, dimana pihak yang satu bertindak sebagai debitur yaitu sebagai orang yang harus menunaikan prestasi dan pihak yang lain bertindak sebagai kreditur sebagai orang yang berhak atas prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang dapat ditagih yang menjadi objek perikatan. Adapun prestasi harus memenuhi syarat-syarat yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, harus terang dan jelas dan mungkin dilaksanakan oleh manusia.³⁹

Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa perjanjian itu merupakan perbuatan hukum antara dua belah pihak atau lebih, dimana terjadinya perjanjian ini harus didasari oleh adanya kesepakatan antara para pihak tanpa ada paksaan dan kemudian juga mereka setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.⁴⁰

³⁹ Riduan Syahrani, op.cit, hlm.206

⁴⁰ Ibid

2. Asas-asas Perjanjian

Adapun asas-asas yang terkandung dalam perjanjian adalah:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri adalah asas yang sangat penting dari Hukum Perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas otonomi atau "*konsensualisme*", yang menentukan adanya perjanjian. Kebebasan berkontrak tidak hanya ada pada KUHPerdara kita namun sudah diakui secara bersama-sama oleh semua negara (bersifat universal).

b. Asas Konsensualisme

Menurut asas ini suatu perjanjian terjadi atau mulai ada sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian, tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.⁴¹

c. Asas Kekuatan Mengikat

Dalam suatu perjanjian ada terkandung suatu asas kekuatan mengikat yang mana terikatnya para pihak tidak hanya sebatas pada apa yang diatur dalam perjanjian namun juga pada kebiasaan dan kepatutan serta norma-norma yang hidup dan berlaku di masyarakat.

⁴¹ A. Qirom Syamsudin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal 19.

d. Asas Kepercayaan

Dengan adanya suatu keadaan saling mempercayai maka pihak-pihak mempunyai keberanian untuk membuat suatu perjanjian dengan harapan bahwa semua pihak akan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam perjanjian tersebut. Maka dengan kata lain perjanjian tidak akan lahir jika tidak ada suatu sikap saling mempercayai antar pihak.

e. Asas Persamaan Hukum

Adanya asas ini mengakibatkan suatu keadaan persamaan derajat semua orang dan selanjutnya masing-masing pihak harus menghargai hak dan kewajiban orang lain dengan kesadaran bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

f. Asas Keseimbangan

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas keseimbangan yang mengharuskan setiap pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya di dalam perjanjian. Kreditur berhak untuk menuntut prestasi namun serta merta juga harus melaksanakan kontra prestasi sebagai kewajibannya kepada debitur dengan itikad baik.

g. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya harus mengandung kepastian hukum sehingga

perjanjian itu memiliki wibawa sama halnya dengan undang-undang. Hal ini terlihat dari kekuatan mengikat dari perjanjian itu sendiri.

h. Asas Moral

Dalam suatu perikatan bisa saja terjadi dimana seseorang melakukan sesuatu bukan karena adanya kewajiban namun oleh karena dorongan moral, peristiwa ini terjadi pada *zaakwaarneming* dimana seseorang melakukan perbuatan dengan suka rela (moral) dan yang bersangkutan kemudian mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan perbuatannya tanpa menuntut suatu kontraprestasi.

i. Asas Kepatutan

Asas ini berkenaan dengan isi perjanjian yang mengarahkan bahwa perjanjian itu juga harus dilaksanakan bersesuaian dengan kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat.

3. Syarat - Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata bunyinya adalah:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal”.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai para pihak atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Adanya kata sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, misalnya si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual.⁴²

Kesepakatan disini menyiratkan bahwa di dalam perjanjian tidak boleh ada paksaan, penipuan ataupun kekhilafan yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian seperti diatur pada Pasal 1321 KUHPerdata.

Pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang dewasa atau akil baliq dan sehat pikiran, adalah cakap menurut hukum. Pasal 1330

⁴² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet XI, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 17

KUHPerdata menyebutkan mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. orang-orang yang belum dewasa;
- b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. orang-orang perempuan, yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya orang kepada siapa undang-undang telah melanggar membuat perjanjian-perjanjian tertentu. (sejak tahun 1963 dengan SEMA No. 3/1963, bahwa kedudukan wanita yang sudah menikah menjadi sederajat dengan suaminya untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan).⁴³

Dipandang dari sudut keadilan, maka perlu orang membuat suatu perjanjian dan akan terikat pada suatu perjanjian, mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan hubungannya itu. Sehingga para pihak yang melaksanakan isi perjanjian mengetahui apa hakekat dan tujuannya.

Syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban sehingga akan jelas jika suatu hari timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, op.cit, hlm 103

harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah berada di tangan si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.⁴⁴

Sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal, Dengan sebab (bahasa Latin *causa*) ini maksudnya adalah isi perjanjian. Undang-undang hanya memperhatikan tindakan orang-orang dalam masyarakat. Gagasan, cita-cita, perhitungan yang menjadi dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tadi bagi undang-undang tidak penting.⁴⁵

4. Pelaksanaan Perjanjian

Salah satu aspek yang sangat penting dalam perjanjian adalah pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan perjanjian inilah yang menjadi tujuan orang-orang yang mengadakan perjanjian, karena dengan pelaksanaan perjanjian itu para pihak yang membuatnya akan dapat memenuhi kebutuhannya, kepentingannya serta mengembangkan minatnya.

Apabila dilihat dari wujudnya, perjanjian adalah rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pihak-pihak

⁴⁴ Subekti, op.cit, hlm 19

⁴⁵ Ibid, hlm 19-20

yang membuat perjanjian. Dalam perjanjian tercantum hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang membuatnya.⁴⁶

Melaksanakan perjanjian berarti melaksanakan sebagaimana mestinya apa yang merupakan kewajiban terhadap siapa perjanjian itu dibuat. Oleh karena itu, melaksanakan perjanjian pada hakikatnya adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain yakni pihak yang berhak atas pelaksanaan perjanjian tersebut.⁴⁷

Apabila perjanjian itu bersegi satu, maka kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut hanya ada pada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain hanya mempunyai hak. Akan tetapi, bilamana perjanjian itu bersegi dua, maka kewajiban untuk melaksanakan perjanjian ada pada kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak secara timbal balik masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan satu sama lain.

Melihat macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:⁴⁸

- a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

⁴⁶ Ibid, hlm.1

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Subekti, loc.cit, hlm.36

sebelum suatu perjanjian dilaksanakan, sudah tentu pihak-pihak yang akan melaksanakan telah mengetahui dan menyadari sepenuhnya apa yang menjadi kewajibannya di samping apa yang menjadi haknya.

Dalam praktek masyarakat seringkali dalam membuat perjanjian hanya mengatur hal-hal yang pokok dan yang penting saja, tidak mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka secara detail. Oleh karena itu untuk mencegah berbagai kesalahan tafsiran dalam suatu perjanjian maka perlu dilakukan “penafsiran perjanjian” yang pengaturannya diatur di dalam rangkaian Pasal 1342-1352 KUHPerdara.

Perjanjian yang sudah dirumuskan dengan syarat baku sekalipun belum menjamin perjanjian itu pasti dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya kecuali perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam rangka pelaksanaan perjanjian, peran itikad baik sungguh mempunyai arti yang sangat penting sekali. Hal ini dapat dipahami karena itikad baik merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.⁴⁹

⁴⁹ Ibid, hlm.43

5. Wanprestasi dan Akibatnya Hukumnya

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestatie” yang berarti prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian, sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan atau somasi terhadapnya terlebih dahulu.

Menurut M. Yahya Harahap, SH., Pengertian wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.⁵⁰ Kalau begitu seorang debitur berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dalam jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut selaknya atau sepatutnya.

Sedangkan Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, SH., menyebutkan bahwa wanprestasi adalah kewajiban tidak memenuhi suatu perutangan, yang terdiri dari dua macam sifat yaitu :⁵¹

1. Terdiri atas hal bahwa prestasi itu masih dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya;

⁵⁰ M. Yahya Harahap, SH., *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal 60

⁵¹ Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, SH., *Hukum Perutangan Bagian*, Seksi Hukum Perdata Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1980, hal 12

2. Terdapat hal-hal yang prestasinya tidak dilakukan pada waktu yang tepat.

Dari kedua pendapat di atas, dapatlah kita menarik suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu kesengajaan atau kelalaian si debitur yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi prestasi yang harus dipenuhinya dalam suatu perjanjian.

Jadi dapat dilihat bahwa wanprestasi itu terjadi atau timbul apabila si berutang yakni debitur tidak memenuhi prestasi yang timbul apabila si berutang yakni debitur tidak memenuhi prestasi yang seharusnya ia lakukan dalam suatu perjanjian dengan seorang kreditur atau si berutang.

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi, adalah sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya;
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Menurut Prof. Subekti, SH, wanprestasi ada empat macam, yaitu ⁵²:

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukanya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

⁵² Prof Subekti, *Hukum perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 45

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut Prof. Subekti, SH, Apabila debitor melakukan wanprestasi maka ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitor, sebagai berikut :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh Kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- b. Pembatalan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya Perkara, kalau sampai diperkarakan di depan sidang;

6. Berakhirnya Perjanjian

Hal-hal yang mengakibatkan hapusnya suatu perikatan dalam KUHPerdara disebutkan pada Pasal 1380 adalah:

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran;
- c. Karena pembayaran tunai, diikuti dengan penitipan atau penitipan;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena percampuran utang;
- f. Karena pembebasan utang;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena kebatalan dan pembatalan;

- i. Karena berlakunya syarat batal;
- j. Karena lewat waktu.

C. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Pengertian UMKM

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang dimaksud Usaha Mikro adalah :

“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi Usaha Mikro, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang dimaksud Usaha Kecil adalah

“Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang dimaksud Usaha Menengah adalah

“Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

2. Asas dan Tujuan UMKM

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Penjelasan dari pasal tersebut :

Pengertian dari kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pengertian dari asas demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Pengertian dari asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiataannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pengertian dari asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Pengertian dari asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Pengertian dari asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pengertian dari asas kemandirian adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pengertian dari asas keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pengertian dari asas kesatuan ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

3. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah tertuang pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- e. Penyelenggaran perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Sedangkan pemberdayaan tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah tertuang pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;

- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan;
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

4. Kriteria UMKM

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah tertuang pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah :
 - 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau;
 - 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300,000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah :
 - 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

D. Program Kemitraan

1. Pengertian Program Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam Pasal 1 (e) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Mitra Bina Lingkungan, yang

dimaksud dengan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

2. Dasar Hukum Program Kemitraan

Terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, membawa paradigma perubahan pengelolaan perusahaan. Salah satunya, di Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT 2007) terdapat kewajiban bagi PT yang mengelola sumber daya alam maka diwajibkan melakukan program model tanggung jawab sosial dan lingkungan atau disebut juga *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Adapun yang dimaksud tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 didefinisikan⁵³ :

“Tanggung jawab social dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”

⁵³ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2008, hal 64*

Program kemitraan melalui BUMN dimulai dengan permintaan Presiden mengenai “ Bapak Angkat” maka dimulailah pembinaan koperasi dan usaha kecil melalui pemanfaatan sisa laba Badan Usaha Milik Negara. Himbauan ini dikukuhkan dengan keluarnya berbagai keputusan peraturan sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi;
- b. Keputusan Menteri Keuangan No.316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari bagian Laba BUMN;
- c. Surat DIRJEN Pembinaan BUMN No. S 148/MK.16/1995 tanggal 19 April 1995 tentang Alokasi dana Pembinaan, BUMN Koordinator dan BUMN pembina disetiap Provinsi;
- d. Keputusan bersama antara DIRJEN Pembinaan BUMN dengan DIRJEN Pembinaan Pengusaha Kecil No. KEP 1515/BU/1994 dan 02/SKB/PPK/X/1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN;
- e. Inpres No.4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan (GNMMK);
- f. Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;

- g. PERMENEG BUMN PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
- h. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Kriteria Penerima Bantuan Program Kemitraan

Adapun kriteria mengenai Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan dijelaskan dalam Pasal 3 PERMENEG BUMN PER-05/MBU/2007, yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- b. Milik Warga Negara Indonesia;
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar;
- d. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
- e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun ; belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*);

- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN pembina.

4. Kewajiban Mitra Binaan dan BUMN Pembina

Adapun Mitra Binaan mempunyai kewajiban dijelaskan dalam Pasal 4 PERMENEG BUMN PER-05/MBU/2007, yaitu:sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur;
- b. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian;
- c. Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodic kepada BUMN Pembina.

Kewajiban BUMN Pembina sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 PERMENEG BUMN PER-05/MBU/2007, yaitu:sebagai berikut:

- a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan;
- b. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;
- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL;

- d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan
- e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat;
- f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
- g. Mengadminitrasikan kegiatan pembinaan;
- h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang meliputi laporan berkala baik triwulan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina diwilayah masing-masing

5. Penetapan dan Penggunaan Dana Program Kemitraan

a. Penetapan Dana Program Kemitraan

Dana Program Kemitraan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 PERMENEG BUMN PER-05/MBU/2007, yaitu bersumber dari :

- 1) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
- 2) Jasa adminitrasi pinjaman atau margin atau bagi hasil, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
- 3) Pelimpahan dan Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

Adapun besarnya dana Program Kemitraan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas ditetapkan oleh :

- 1) Menteri untuk Perum;
- 2) RUPS untuk Persero.

Dalam Kondisi tertentu besarnya Dana Program Kemitraan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri atau RUPS. Dana Program Kemitraan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas disetorkan ke rekening Dana Program Kemitraan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan. Pembukuan Dana Program Kemitraan dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina.

b. Penggunaan Dana Program Kemitraan

Dana Program Kemitraan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat 1 PERMENEG BUMN PER-05/MBU/2007, yaitu diberikan dalam bentuk :

- 1) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;

- 2) Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
- 3) Beban pembinaan :
 - a) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian atau penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
 - b) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (duapuluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
 - c) Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penelitian

1. Sejarah Singkat dan Perkembangan Umum PT. Telkom, Tbk

PT. Telekomunikasi (Telkom) Indonesia merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak di bidang jasa komunikasi telekomunikasi umum dalam negeri. Pada awalnya, PT. Telkom bernama *Post en Telegraafdienst* dengan *staatsblad* atau surat keputusan nomor 52 tahun 1884. Pada masa itu, *Post en Telegraafdienst* merupakan perusahaan swasta di jaman pemerintahan Belanda. Pada tahun 1906, perusahaan *Post en Telegraafdienst* diambil alih oleh pemerintah Belanda dengan *staatsblad* nomor 395 tahun 1906. Sejak itulah perusahaan yang bergerak di bidang jasa komunikasi ini berubah nama menjadi Perusahaan Negara (PN) pada tahun 1927 dengan *staatsblad* nomor 419 tahun 1927 tentang *Indische Bedrijven Wet* (IBW).

Masa perjalanan perusahaan komunikasi ini kembali berubah pada tahun 1960 dengan keluarnya Peraturan Perundang-undangan (Perpu) mengenai syarat perusahaan Negara dan ditetapkan menjadi perusahaan Negara dengan Perpu nomor 240 tahun 1981 dan berganti nama menjadi PN Pos dan Komunikasi. Setelah empat tahun menjadi PN Pos dan Komunikasi, perusahaan ini harus mematuhi Peraturan Pemerintah mengenai pemisahan antara Pos Giro dan Komunikasi. Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan Nomor

129/U/1970 dan berganti nama menjadi Perusahaan Negara (PN) Telekomunikasi. Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 1974 menjadikan PN Telekomunikasi berubah nama menjadi Perumtel (Perusahaan Umum Telekomunikasi) dalam dan luar negeri. Pada saat itu, hubungan telekomunikasi luar negeri diselenggarakan oleh PT. Indonesia Satellite (Indosat) yang masih berstatus perusahaan asing dari America Cable and Radio Corporation, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara bagian Delaware, Amerika Serikat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 1980 tentang Telekomunikasi untuk umum yang isinya tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 Tahun 1974. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 1980, Perumtel ditetapkan sebagai Badan Usaha yang berwenang menyelenggarakan Telekomunikasi untuk umum dalam negeri dan Indosat ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggara Telekomunikasi untuk umum internasional.

Memasuki Repelita V Pemerintah merasakan perlunya percepatan pembangunan telekomunikasi, karena sebagai infrastruktur diharapkan dapat memacu pembangunan sektor lainnya. Selain itu, penyelenggaraan telekomunikasi membutuhkan manajemen

yang lebih professional sehingga perlu meningkatkan bentuk perusahaan. Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 maka bentuk perusahaan umum dialihkan menjadi Perseroan Terbatas (PT), sejak itulah berdiri PT. Telkom dan berubah nama menjadi PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang disahkan pada tahun 1995.

2. Peranan PT. Telkom dalam pengelolaan Program Kemitraan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

Penggunaan istilah Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) akhir-akhir ini semakin populer dengan semakin meningkatnya praktek tanggung jawab sosial perusahaan, dan diskusi-diskusi global, regional dan nasional tentang CSR. Istilah CSR yang mulai dikenal sejak tahun 1970-an, saat ini menjadi salah satu bentuk inovasi bagi hubungan perusahaan dengan masyarakat dan konsumen.⁵⁴

CSR kini banyak diterapkan baik oleh perusahaan multi-nasional maupun perusahaan nasional atau lokal. CSR adalah tentang nilai dan standar yang berkaitan dengan beroperasinya sebuah perusahaan dalam suatu masyarakat. CSR diartikan sebagai komitmen usaha untuk beroperasi secara legal dan etis yang berkontribusi pada peningkatan kualitas

⁵⁴ Edy Suharto, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, dikutip dari <http://www.tekmira.esdm.go.id>, pada tanggal 5 Februari 2010, pukul 17.05 WIB

kehidupan karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.⁵⁵

CSR berakar dari etika dan prinsip-prinsip yang berlaku di Perusahaan dan dimasyarakat. Etika yang dianut merupakan bagian dari budaya (*corporate culture*); dan etika yang dianut masyarakat merupakan bagian dari budaya masyarakat. Prinsip-prinsip atau azas yang berlaku di masyarakat juga termasuk berbagai peraturan dan regulasi pemerintah sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan.

Menurut Jones (2001) seseorang atau lembaga dapat dinilai membuat keputusan atau bertindak etis bila:⁵⁶

- a. Keputusan atau tindakan dilakukan berdasarkan nilai atau standar yang diterima dan berlaku pada lingkungan organisasi yang bersangkutan;
- b. Bersedia mengkomunikasikan keputusan tersebut kepada seluruh pihak yang terkait;
- c. Yakin orang lain akan setuju dengan keputusan tersebut atau keputusan tersebut mungkin diterima dengan alasan etis.

Suatu perusahaan seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan sebanyak mungkin, tetapi juga mempunyai etika dalam bertindak menggunakan sumberdaya manusia dan lingkungan guna turut mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pengukuran kinerja yang semata dicermati dari komponen

⁵⁵ Dikutip dari <http://www.telkom.co.id>, pada tanggal 5 Februari 2010, pukul 17.20 WIB

⁵⁶ Mahmudi, Lingkungan, *Masyarakat dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan – CSR*, dikutip dari <http://www.fema.ipb.ac.id>, pada tanggal 5 Februari 2010, pukul 17.20 WIB

keuangan dan keuntungan (*finance*) tidak akan mampu membesarkan dan melestarikan, karena seringkali berhadapan dengan konflik pekerja, konflik dengan masyarakat sekitar dan semakin jauh dari prinsip pengelolaan lingkungan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Salah satu perusahaan BUMN di Indonesia yang menerapkan tanggung jawab sosial dalam praktek bisnisnya adalah PT.

Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi berkewajiban membantu meningkatkan perekonomian Negara dan meningkatkan jalinan kemitraan yang saling menguntungkan dan mendukung secara sinergis antara PT. Telkom Indonesia, Tbk dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya melalui Direksi Telkom, PT Telkom Indonesia, Tbk mengeluarkan Keputusan Direksi pada tanggal 6 Juni 2007 Nomor : KD 30/ PR. 000/COP-B0030000/2007 tentang Pengelolaan program Kemitraan dan program Bina Lingkungan dan KD 12/ PS150/COP-B0030000/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2008 tentang Organisasi Pusat pengelolaan. Organisasi ini diberi nama *Telkom Comunnity Development Center* (TCDC).

Salah satu tugas unit CDC adalah program kemitraan. Untuk melaksanakan Program Kemitraan (PK) tersebut, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk khususnya unit CD Area Sub Area Semarang menjalin kerjasama dengan para Usaha Mikro dan Kecil di Area Semarang. Kerjasama yang selama ini telah dilaksanakan berupa bantuan pinjaman lunak atau pinjaman modal,

yang berasal dari bagian laba perusahaan sebesar 1-3 % laba bersih perusahaan. Sektor-sektor usaha yang mendapatkan modal melalui PK antara lain : Usaha perdagangan, peternakan, perikanan, Jasa, Industri, Perkebunan, Pertanian dan sektor lainnya.

B. Pembahasan

1. Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Oleh BUMN

a. Mekanisme Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Oleh BUMN

Program kemitraan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang berlaku bagi semua perjanjian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata, yang menyatakan semua perjanjian baik yang bernama maupun perjanjian tidak bernama tunduk pada peraturan-peraturan umum dalam Buku III KUH Perdata.

Kemitraan dapat dihubungkan dengan KUH Perdata yang mengacu pada Buku III tentang perikatan. Perikatan sendiri mempunyai pengertian dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Perikatan mempunyai 2 (dua) sumber sesuai dengan Pasal 1233 KUH Perdata, yaitu perikatan yang bersumber dari undang-undang dan perikatan yang bersumber dari perjanjian.

Dilihat dari proses pemberian pinjaman maka kerja sama antara BUMN selaku pembina dan mitra binaannya bersumber pada undang-undang dan perjanjian. Kemitraan merupakan implementasi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Perjanjian antara para pihak biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis (kontrak) dan kontrak yang dibuat merupakan suatu undang-undang bagi para pihak yang saling mengikatkan dirinya, kontrak tersebut harus dipatuhi, hal ini berlaku juga dalam perjanjian antara PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk unit CD Area Sub Area Semarang dengan mitra binaannya sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) Jo. Pasal 1340 KUH Perdata. Bila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sesuai apa yang telah diperjanjikan maka akan mendapatkan akibat hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Uraian tentang perjanjian pinjam meminjam telah dijelaskan dalam bab II. Perjanjian pinjam meminjam merupakan dasar dari kerja sama dalam hal peminjaman modal dari PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk unit CD Area Sub Area Semarang kepada usaha mikro dan kecil melalui program mitra binaan usaha.

Program kemitraan BUMN adalah program untuk meningkatkan program kemitraan usaha kecil agar tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Kriteria Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan diatur sesuai dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 2) Milik Warga Negara Indonesia;
- 3) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;

- 4) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
- 5) Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- 6) Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
- 7) Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*)

Dana program kemitraan diberikan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis perjanjian yang sesuai untuk kerjasama ini adalah perjanjian pinjam meminjam antara BUMN Pembina dengan Mitra Binaannya.

Proses penyaluran dana Program Mitra Binaan Usaha oleh BUMN diatur didalam Pasal 12 PERMENEG BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yaitu :

- 1) Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan:
 - a) Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya

untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut :

1. Nama dan alamat unit usaha;
2. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
3. Bukti Identitas diri pemilik/pengurus;
4. Bidang usaha;
5. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
6. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan
7. Rencana usaha dan kebutuhan dana.

- b) BUMN pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;
- c) Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur bersangkutan;
- d) Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian / kontrak yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
 2. Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
 3. Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
 4. Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).
 5. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur lain.
- 2) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas;
- 3) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan Menteri sebagaimana pada ayat (2) diatas;
- 4) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina

adalah mulai dari 10% (10:90) sampai dengan maksimal 50% (50:50);

- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga terhadap rasio bagi hasil untuk BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur.

Diharapkan semua proses yang ada dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, agar proses penyaluran dana pinjaman modal untuk mitra binaan usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar, sehingga kedua belah pihak yang bermitra dapat mengambil manfaat dari program tersebut. Pasal 12 huruf (d) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, mengatur mengenai pemberian pinjaman calon mitra binaan dituangkan dalam surat perjanjian atau kontrak yang sekurang - kurangnya memuat :

- 1) Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
- 2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
- 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya;

- 4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).

Dengan demikian isi surat perjanjian yang diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata seperti yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk unit CD Area Sub Area Semarang.

**b. Mekanisme Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Oleh BUMN
Pada PT. Telkom, Tbk CD Sub Area Semarang**

PT. Telkom, Tbk CD Sub Area Semarang mempunyai tata cara atau proses dalam memberikan pinjaman modal kepada mitra binaan, namun dalam proses pemberian pinjaman PT. Telkom, Tbk CD Sub Area Semarang tidak terlepas dari aturan hukum yang berlaku dalam hal ini PERMENEG BUMN PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Pemberian pinjaman modal oleh PT. Telkom, Tbk CD Sub Area Semarang kepada mitra binaan dilakukan empat kali dalam

satu tahun, dalam pemberian pinjaman juga dikenakan bunga kepada para mitra binaannya. Besarnya bunga yang diberikan adalah sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari limit pinjaman minimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan jangka waktu pengembalian selama 2 tahun, namun jumlah tersebut bukanlah jumlah yang baku, calon mitra binaan bisa saja mendapatkan lebih dari jumlah tersebut sesuai dengan kondisi dan persyaratan yang ada juga sesuai pula dengan usaha yang dikelola apabila permintaan calon mitra binaan disetujui oleh Manager CDC AREA 04 Jateng - DIY.⁵⁷

Proses pemberian pinjaman dari PT. Telkom, Tbk CD Sub Area Semarang kepada mitra binaannya dilakukan melalui beberapa tahap,yaitu:⁵⁸

- 1) Proposal Permohonan pinjaman modal;
- 2) Evaluasi Pendahuluan;
- 3) Survei Lapangan;
- 4) Evaluasi Akhir;
- 5) Penyaluran Pinjaman.

Proses pemberian pinjaman modal dari PT. Telkom, Tbk CD Sub Area Semarang kepada Mitra Binaannya diawali dengan

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Abi Mulantono, tanggal 19 Agustus 2009

⁵⁸ Ibid, Wawancara dengan Bapak Abi Mulantono

adanya proposal permohonan pinjaman dari calon mitra binaan kepada PT. Telkom, Tbk CD Sub Area Semarang yang ditujukan kepada Manager CDC AREA 04 Jateng - DIY.

Secara umum persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pinjaman modal dari PT. Telkom, Tbk CD Sub Area Semarang berdasarkan proposal pemberian pinjaman modal antara lain :⁵⁹

1) Data Pribadi :

- a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (suami dan istri);
- b) Foto copy Kartu Keluarga;
- c) Surat keterangan domisili dan usaha;
- d) Fotocopy rekening Bank Mandiri an. YBS;
- e) Foto 3x4 suami/istri 2 lembar
- f) Foto copy Surat Ijin Usaha
- g) Foto copy rekening listrik / PDAM / PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
- h) Serta identitas keluarga terdekat yang tidak serumah

2) Badan Usaha :

- a) Nama Usaha;
- b) Nama Pemilik;

⁵⁹ Proposal Permohonan Pinjaman Dana Program Kemitraan PT. Telkom, Tbk CD Sub Area Semarang

- c) Bentuk Badan Hukum;
- d) Surat Perjanjian yang dimiliki;
- e) Alamat Usaha;
- f) Status Tempat Usaha;
- g) Sektor dan Jenis Usaha;
- h) Lama Usaha (tahun sejak);
- i) Jumlah Tenaga Kerja;
- j) Pemasaran;
- k) Peralatan yang digunakan;
- l) Volume Produksi (per tahun dan per bulan);
- m) Volume Penjualan (per tahun dan per bulan);

3) Aspek Keuangan

- a) Neraca per tahun dan per bulan;
- b) Realisasi rugi/laba 3 bln;
- c) Jumlah Pinjaman yang dibutuhkan;
- d) Rencana Pengembangan Usaha;
- e) Rencana Laba/Rugi yang akan datang jika pengembangan dilakukan.

Di dalam proposal pemberian pinjaman oleh PT. Telkom, Tbk CD Sub Area Semarang kepada mitraannya terdapat juga surat persetujuan suami atau istri, tidak dalam pembinaan dari

BUMN dan Instansi lain dan bersedia mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan.

Proses selanjutnya adalah pengisian formulir evaluasi pendahuluan, pada evaluasi pendahuluan ini petugas PT. Telkom, Tbk CD Sub Area Semarang memasukkan data yang telah diisi oleh calon mitra binaan dalam proposal pemberian pinjaman, untuk selanjutnya mendapat disposisi dari Manager CDC AREA 04 Jateng - DIY.

Survey lapangan dapat dilakukan setelah evaluasi pendahuluan disetujui. Petugas diterjunkan langsung ke lapangan agar ada kesesuaian antara data yang telah diberikan oleh calon mitra binaan di dalam proposal pendahuluan dan evaluasi pendahuluan, selain itu dengan adanya survey lapangan ke lokasi usaha calon mitra binaan, petugas dapat menentukan jumlah pinjaman yang pantas untuk diberikan kepada calon mitra binaan.

Jumlah pinjaman yang diminta oleh calon mitra binaan di dalam proposal pendahuluan dan evaluasi pendahuluan, bisa saja diberikan sepenuhnya dan juga sebaliknya tergantung dari penilaian petugas setelah melakukan survey lapangan. Bila survey lapangan disetujui maka dapat langsung dilaksanakan proses selanjutnya yaitu evaluasi akhir.

Evaluasi akhir ini dilakukan dengan memasukan data dari calon mitra binaan yang telah diterima baik data yang bersifat tertulis maupun data yang diterima oleh petugas dari survey lapangan. Proses ini dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih selama 1 bulan. Setelah proses evaluasi akhir maka proses selanjutnya adalah penyaluran pinjaman kepada calon mitra binaan, penyaluran ini dilakukan kurang lebih 1 minggu setelah evaluasi akhir disetujui.

Penyaluran pinjaman yang dilakukan antara PT. Telkom, Tbk CD Sub Area Semarang kemudian dituangkan dalam suatu bentuk akte perjanjian pinjam meminjam, ini dilakukan agar kedua belah pihak mempunyai suatu hak dan kewajiban hukum sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian ini dibuat 2 rangkap yang telah dibubuhi materai, masing-masing pihak memegang 1 rangkap perjanjian.⁶⁰

Proses penyaluran di atas merupakan bentuk proses penyaluran yang dimiliki oleh PT. Telkom, Tbk CD Sub Area Semarang, namun proses tersebut tidak menyimpang dari proses yang diatur di dalam PERMENEG BUMN PER-05/MBU/2007

⁶⁰ Pasal 8 ayat 2 tentang Surat Perjanjian Tentang Pinjaman Program Kemitraan..

Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

2. Ketentuan penyelesaian *wanprestasi* dalam pemberian bantuan pinjaman modal oleh PT. Telkom, Tbk CD Sub Area Semarang

Pada praktik pemberian pinjaman modal dari PT. Telkom, Tbk CD Sub Area Semarang kepada Mitra binaannya banyak kendala yang dihadapi, tidak jarang mitra binaan memiliki rasa ketergantungan yang berlebihan terhadap BUMN pembinanya, karena banyak mendapatkan fasilitas pinjaman dengan bunga yang lunak yang membuat para mitra binaannya cenderung mengandalkan BUMN pembinanya, sehingga para mitra binaan menganggap pinjaman dari BUMN sebagai bantuan hibah yang tidak perlu dikembalikan lagi dan sering dijumpai piutang macet dalam pengembalian pinjaman.

Jumlah yang bermasalah dalam pengembalian pinjaman sangat banyak, utang tersebut menjadi utang macet karena mitra binaannya tidak dapat mengembalikan pinjaman baik yang disengaja maupun yang memang tidak sengaja dilakukan. Utang macet tersebut merupakan suatu wanprestasi dari mitra binaan, karena pihak mitra binaan tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pinjam meminjam antara PT. Telkom, Tbk CD Sub Area Semarang dengan Mitra Binaannya.

Hal ini tentu saja menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, sehingga untuk mengatasi hal tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan pembinaan yang diharapkan, maka perselisihan tersebut harus ada penyelesaiannya. KUH Perdata menyebutkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penyelesaian *wanprestasi* diantaranya dengan ganti rugi dan pembatalan perjanjian.

Wanprestasi itu sendiri mempunyai akibat-akibat hukum sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1267 KUH Perdata:

“ Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat menilai apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, apakah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai biaya kerugian dan bunga”

Di dalam surat perjanjian antara PT. Telkom, Tbk CD Sub Area Semarang dengan mitra binaannya tidak dicantumkan hal pembatalan perjanjian dan ganti rugi, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata sehingga menggunakan cara lain yang di tempuh untuk menyelesaikan masalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) akta perjanjian kerja sama dalam hal pemberian bantuan pinjaman modal dari PT. Telkom,

Tbk CD Sub Area Semarang kepada Koperasi dan Usaha Kecil, yang menyatakan bahwa:

“Apabila timbul perselisihan atas pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat

Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan mengenai :

“Apabila dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat diselesaikan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyerahkan persoalan tersebut kepada Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan yang terkait dan keputusannya mengikat kedua belah pihak”

Dan dalam pasal 7 ayat (3) dijelaskan mengenai :

“Apabila karena sesuatu hal PIHAK KEDUA harus melepaskan kedudukan sebagai pemilik perusahaan, maka sebagai penerus Surat Perjanjian ini adalah Ahli Waris yang ditunjuk sebagai penggantinya”

Banyak cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah dalam meningkatkan bantuan pembinaan usaha kecil. PT. Telkom, Tbk CD Sub Area Semarang menilai terlebih dahulu mitranya yang bermasalah, kemudian dicari bentuk penyelesaian permasalahan yang tepat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat proses berlangsung, untuk menghindari Pasal 1267 KUHPdata dalam hal ini pembatalan perjanjian yang akan menyebabkan kerugian PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk khususnya

unit CD Area Sub Area Semarang maka dilaksanakan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang merupakan implementasi dari penyelesaian terhadap kendala-kendala yang timbul sesuai dengan kaidah dan peraturan hukum yang berlaku di negara kita.

Berkenaan dengan adanya piutang macet maka PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk khususnya unit CD Area Sub Area Semarang melakukan inventarisasi ulang mitra binaan yang belum melunasi pinjamannya, kemudian dilakukan survei lapangan yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari personil PT. Telkom, Tbk CD Sub Area Semarang.

Apabila mitra binaan terbukti belum melunasi pinjamannya maka dilakukan peringatan berupa teguran kepada pihak mitra binaan. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk unit CD Area Sub Area Semarang dapat melakukan penagihan melalui telepon atau lisan, diharapkan dengan cara ini mitra binaan akan segera melunasi tagihan-tagihannya, karena pihak mitra binaan berbicara langsung dengan pihak PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk khususnya unit CD Area Sub Area Semarang sehingga akan timbul perasaan tidak enak dan pihak mitra binaan akan berusaha melunasi.

Jika teguran secara lisan belum dapat membuat mitra binaan melunasi pinjamannya maka PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk unit CD Area Sub Area Semarang akan membuat Surat Peringatan yang berisi peringatan untuk melunasi tagihan yang berupa angsuran pinjaman dana usaha. Surat Konfirmasi ini dibuat sebanyak 3 kali. Di dalam surat diberitahukan bahwa angsuran tersebut sudah jatuh tempo dan mitra binaan harus melunasi secepatnya.

Selain cara tersebut di atas PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk unit CD Area Sub Area Semarang mempunyai pendekatan-pendekatan tertentu dalam menyelesaikan *wanprestasi* yang dilakukan mitra binaannya. Bagian pembinaan usaha mikro kecil dari PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk unit CD Area Sub Area Semarang mempunyai cara penyelesaian yaitu dengan upaya pendekatan kerohanian atau sarasehan. Caranya dengan mengumpulkan mitra binaan yang bermasalah kemudian diadakan ceramah-ceramah keagamaan untuk menyadarkan para mitra binaan agar tidak lari dari kewajibannya dan diharapkan segera melunasinya.

Selain itu ada cara lagi yaitu dengan mengikutkan sertakan mitra binaan dalam pameran-pameran, dengan diikuti sertakannya mitra binaan di dalam pameran-pameran oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk unit CD Area Sub Area Semarang diharapkan mitra

binaan dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga mitra binaan mempunyai kesempatan untuk dapat membayar tagihan.

Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan menjelaskan, terhadap kualitas pinjaman yang kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria :

- a. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
- b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
- c. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi dapat dihapuskan dan atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo, tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Bila terjadi piutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (*Force Majeure*) seperti, Mitra Binaan meninggal dunia dan

tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutang dan atau gagal usaha akibat bencana alam atau kerusakan, pemindah bukuan piutang macet tersebut dalam pos pinjaman bermasalah dapat dilaksanakan tanpa melalui proses melalui pemulihan pinjaman sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Penghapus bukuan atau *write off* juga merupakan salah satu bentuk penyelesaian dalam piutang macet, yang baru akan diusulkan kepada Direksi untuk beberapa mitra yang sangat sulit dalam pengembalian pinjaman modal, namun upaya penagihan tetap dilakukan semaksimal mungkin. Penghapus bukuan atau *write off* ini tidak menghapuskan utang dari mitra binaan itu sendiri melainkan hanya memasukan mitra binaan yang mengalami utang macet kedalam neraca yang berbeda. Cara ini digunakan apabila cara-cara yang lain telah terlebih dahulu di laksanakan.

Diharapkan dengan adanya kepastian hukum yang terdapat dalam pemberian bantuan pinjaman dari PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk unit CD Area Sub Area Semarang kepada mitra binaannya dan dalam proses pengembalian pinjaman yang

dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan aturan yang ada, dapat meningkatkan kinerja dari usaha mikro dan kecil.

Selain itu diharapkan dapat mengurangi penyimpangan terhadap perjanjian dalam peminjaman modal sehingga perekonomian Indonesia dapat lebih berkembang kearah yang lebih baik karena koperasi dan usaha kecil merupakan tulang punggung serta salah satu struktur dalam perekonomian nasional

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk unit CD Area Sub Area Semarang dalam pemberian pinjaman bantuan modal kepada usaha mikro dan kecil berlaku ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata yang dituangkan dalam perjanjian tertulis atau kontrak kerjasama mitra binaan usaha dan mengenai pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
2. Ketentuan penyelesaian apabila terjadi *wanprestasi* dan dalam akta perjanjian antara PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk unit CD Area Sub

Area Semarang dengan mitra binaannya, tidak dicantumkan hal pembatalan perjanjian dan ganti rugi maka cara yang ditempuh :

- 1) Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, cara yang ditempuh untuk menyelesaikan *wanprestasi* yaitu menggunakan jalur non-litigasi (ADR / *Alternative Dispute Resolution*);
- 2) Apabila semua cara ini telah dilakukan tetapi mitra binaan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka penyelesaian akan ditempuh melalui jalur litigasi yaitu lewat Pengadilan Negeri setempat.

B. Saran

Dalam rangka peningkatan program mitra binaan usaha ke depan, maka penulis mengemukakan saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk unit CD Area Sub Area Semarang sebaiknya harus lebih sering lagi mengadakan sosialisasi mengenai program mitra binaan usaha, dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam proses pembinaan.
2. Dalam pembuatan perjanjian peminjaman modal antara PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk unit CD Area Sub Area Semarang dengan mitra binaannya, sebaiknya membuat juga perjanjian *accessoir* untuk pengikatan jaminan, sehingga lebih mempunyai kekuatan

hukum apabila suatu saat pihak mitra binaan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang diperjanjikannya, pihak pembina dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut

Daftar Pustaka

- Ali, Cidir., 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung
- Budiharto Agus., 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia, Indonesia
- Dirdjosisworo Soedjono., 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,
- Hartono Siti Sumarti., 1998, *Perseroan Terbatas Dalam Pendirian, Kertas Kerja Dalam Seminar Sehari Hukum Perseroan dan Hukum Pertanggung (Asuransi) Dalam Kenyataan dan Harapan*. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta
- Hartono, Sri Redjeki., 2000 ,*Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung
- Harahap Yahya., 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Ichsan, Ahmad., 1986, *Dunia Usaha Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Kansil C.S.T dan Christie S.T. Kansil., 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007*, Jakarta
- Muhammad, Abdul Kadir., 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi.,2002, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Rusli Hardja.,1997, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Salam, Mochamad Faisal., 2005 *Pemberdayaan BUMN di Indonesia*, Pustaka, Bandung
- Setiawan., 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung
- Soemitro, Ronny Hanijitjo., 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Gahalia Indonesia, Jakarta
- Simanjuntak Parasian.,2006, *RUPS Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta
- Soedewi Sri Masjchoen Sofyan., 1980, *Hukum Perutangan Bagian*, Seksi Hukum Perdata Universitas Gajah Mada Yogyakarta
- Soemitro Rahmat., 1982, *Penuntun Perseroan Terbatas dan Undang - Undang Pajak Perseroan*, PT. Erosco, Bandung
- Soerjono Soekanto., 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Subekti., 1995, *Aneka Perjanjian*, : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- ., 2002, *Hukum Perjanjian*, : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Tugiman, Hiro., 1995, *Peranan Usaha Kecil dan Koperasi dalam Memanfaatkan Sisa Laba BUMN*, Eresco, Bandung
- Waluyo Bambang., 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Garfika, Jakarta
- Widjaya I.G. Ray., 2006 *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha, Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama.,2008, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta

Qirom A. Syamsudin M.,1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta

Perundang-undangan :

Undang - Undang Dasar 1945

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

PERMENEG BUMN PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Internet :

Depkop, *Pemberian Modal untuk KUKM*, dikutip dari www.depkop.go.id, pada tanggal 3 Juli 2009 pukul 20.30

Edy Suharto, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, dikutip dari [http:// www.tekmira.esdm.go.id](http://www.tekmira.esdm.go.id), pada tanggal 5 Februari 2010, pukul 17.05 WIB

Mahmudi, *Lingkungan, Masyarakat dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan – CSR*, dikutip dari [http://www.fema .ipb.ac.id](http://www.fema.ipb.ac.id) , pada tanggal 5 Februari 2010, pukul 17.20 WIB

Wikipedia, *Permodalan Usaha Kecil dan Kopersi*, dikutip dari <http://www.wikipedia.org> pada tanggal 4 Juli 2009 pukul 16.00

Wikipedia, *Segala Sesuatu Mengenai Koperasi*, di kutip dari www.id.wikipedia.org, tanggal 19 Juni 2009 pukul 21.00

